P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

STRATEGI UPTD KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM MEMBANGUN KOLABORASI *STAKEHOLDER* DAN MENGATASI TANTANGAN PENGELOLAAN HUTAN (Studi Kasus Di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu)

OLEH:
Apolonia Susanti Lende, Nixon Rammang*, Roni H. Sipayung, Bertila Avila Delvion *****

ABSTRAK

Hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan hutan untuk membangun kolaborasi antara berbagai *stakeholder* agar mampu mengatasi berbagai tantangan pengelolaan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antar kesatuan pengelolaan hutan Sumba Timur dalam pengelolaan hutan di Desa Wanga, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi kesatuan pengelolaan hutan Sumba Timur dalam pengelolaan hutan dan untuk merumuskan strategi kolaborasi antar kesatuan pengelolaan hutan Sumba Timur dan masyarakat desa Wanga dalam pengelolaan hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan UPTD KPH Sumba Timur, pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat, Lembaga swadaya masyrakat, dan penyuluh kehutanan. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan matriks IFAS, EFAS dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan pola hubungan yang bangun oleh UPTD KPH sumba timur bersama Masyarakat berjalan dengan baik dengan beberapa *stakeholder* yang terlibat yaitu, Masyarakat desa wanga, UPTD KPH Sumba Timur, penyuluh pertanian kehutanan dan Perusahaan swasta yaitu PT Muria Sumba Manis. Efektivitas kolaborasi dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan kesamaan, dukungan kebijakan dan sarana prasarana, serta partisipasi dan insentif ekonomi masyarakat. Hasil analisis SWOT menunjukkan nilai IFAS (*strength - weakness*) sebesar 0,78 dan nila EFAS (*opportunities - threats*) sebesar 0,80 sehingga posisi strategi UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur berada pada Kuadran I yaitu Strategi Agresif.

Kata kunci: Kolaborasi *Stakeholder*, UPTD KPH Sumba Timur, Pengelolaan Hutan

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

PENDAHULUAN

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang didominasi oleh pepohonan dalam satu kesatuan alam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan antara unsur hayati dan non-hayati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hutan dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pengelolaan hutan dilakukan melalui sistem KPH sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Perencanaan Kehutanan. KPH dibentuk sebagai unit pengelolaan pada tingkat tapak yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan hutan, menyusun rencana pengelolaan, memanfaatkan hutan, melakukan rehabilitasi, melindungi, serta memberdayakan masyarakat (Zakaria & *et al*., 2018).

Unit Pengelola Tingkat Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur, meliputi fungsi hutan lindung dan hutan produksi yang tersebar di beberapa kecamatan, UPTD KPH juga berperan sebagai pendamping yang memadukan berbagai kepentingan sosial, ekonomi, serta lingkungan dalam satu kesatuan pengelolaan. Melalui pendekatan partisipatif, UPTD KPH berupaya dalam melibatkan masyarakat, pengawasan

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

serta pelaksanaan pengelolaan hutan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kerja sama yang sesuai dengan konservasi hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, sehingga pengelolaan hutan tidak hanya mengarah pada kelestarian tetapi juga pada pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan (Rahman *et al*., 2021)

Desa Wanga merupakan salah satu desa yang berada dalam lingkup kerja UPTD KPH Sumba Timur. Secara geografis, desa Wanga berbatasan dan berinteraksi langsung dengan kawasan hutan, sehingga masyarakatnya memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya hutan, seperti kayu bakar, bahan bangunan, maupun hasil hutan bukan kayu (Awang, 2003 *dalam* Suharjito, 2014). Namun, pengelolaan hutan di Desa Wanga masih menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan perluasan lahan pertanian dan penggembalaan ternak pemanfaatan kayu yang belum sepenuhnya terkontrol, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai status dan fungsi kawasan hutan.

Berdasarkan kondisi pengelolaan hutan di desa Wanga, maka perlu diperkuat tingkat partisipasi dan efektivitas kerja sama antara pemerintah, KPH, dan masyarakat desa dengan upaya pembentukan forum atau wadah kolaborasi. Dalam perspektif *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2007) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam sangat ditentukan oleh kondisi awal kolaborasi, keseimbangan kekuasaan antar aktor, tingkat kepercayaan, serta kepemimpinan fasilitatif yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan pengelolaan hutan yang kolaboratif, melibatkan pemerintah daerah, UPTD KPH, pemerintah desa, dan

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

masyarakat sebagai pihak utama dalam menjaga kelestarian fungsi hutan. Pendekatan tata kelola kolaboratif menekankan pentingnya keterlibatan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan (Emerson *et al.*, 2012). Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai strategi UPTD KPH dalam membangun kolaborasi *stakeholder* serta menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Tujuan dari penelitian yaitu: Untuk mengetahui pola hubungan antar kesatuan pengelolaan Hutan Sumba Timur dan Masyarakat desa dalam pengelolaan hutan di Desa Wanga. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi kesatuan pengelolaan hutan Sumba Timur dalam pengelolaan hutan. Untuk merumuskan strategi kolaborasi antar kesatuan pengelolaan hutan Sumba Timur dan masyarakat desa Wanga dalam pengelolaan hutan

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama dua bulan pada bulan April-Mei 2026, di Desa Wanga Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Peta penelitian disajikan pada gambar 2.1.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penlitian ini yaitu: *handphone*, laptop, alat tulis. sedangkan bahan yang digunakan adalah kuesioner.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap beberapa informan kunci untuk memperoleh penjelasan terkait tantangan dalam pengelolaan hutan dari masing-masing *stakeholder*, serta peran mereka, sementara kegiatan observasi dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang para *stakeholder* dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Sedangkan data sekunder adalah data yang dari hasil pengamatan yang berkaitan dengan kolaborasi antar *stakeholder.*

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Wawancara

   Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan saling memberikan informasi melalui tanya jawab untuk menelusuri penjelasan langsung dari informan pegawai UPTD KPH Sumba Timur, kepala desa, masyarakat desa Wanga, LSM dan penyuluh pertanian kehutanan.

2. Observasi

   Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan dengan mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPH Sumba Timur.

3. Dokumentasi

   Metode yang digunakan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi dengan menyimpan berbagai kegiatan yang berisi proses dan hasil penelitian melalui pengambilan gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data.

Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan bahwa tidak semua pihak yang berada di UPTD KPH Sumba Timur maupun masyarakat yang tinggal di Desa Wanga memiliki pemahaman, informasi, dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, hanya informan tertentu yang dipilih,

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

seperti pegawai UPTD KPH, kepala desa, tokoh adat, masyarakat, perwakilan LSM, serta penyuluh kehutanan. Informan-informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan hutan sehingga mampu memberikan informasi yang lebih mendalam terkait penelitian ini.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan deskripstif kualitatif dan Analisis Internal *Strategy Factor Summary* (IFAS) dan *External Strategy Factor Summary* (EFAS). Kualitatsif. Deskriptif kualitatif merupakan data yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi dari hasil observasi, wawancara, dan juga kuesioner dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, dan menjelaskan masalah secara lebih rinci (Arif, 2024). Analisis IFAS dan EFAS merupakan salah satu metode analisis yang berasal dari teori SWOT yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal suatu instansi. Dalam analisis strategi kolaborasi *stakeholder*, matriks IFAS digunakan untuk menganalisis faktor internal, yaitu kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh UPTD KPH dalam membangun kolaborasi dan mengatasi tantangan pengelolaan hutan. Sementara itu matriks EFAS digunakan untuk menganalisis peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang dimiliki oleh UPTD KPH dalam membangun kolaborasi dan mengatasi tantangan pengelolaan hutan (Fitrhiyani *dalam* Sesfao, 2025).

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

Dalam analisis IFAS dan EFAS ini akan dicari bobot, rating serta skor (Rangkuti, 1997), seperti tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Matriks IFAS dan EFAS

Faktor Strategi Internal	**Bobot**	**Rating**	**Skor Bobot x Rating**
Kekuatan 1. 2.			
Kelemahan 1. 2.			
Jumlah			
S-W			
Faktor Strategi Eksternal	**Bobot**	**Rating**	**Skor Bobot x Rating**
Peluang 1. 2.			
Ancaman 1. 2.			
Jumlah			
O-T			

Sumber: Rangkuti (1997)

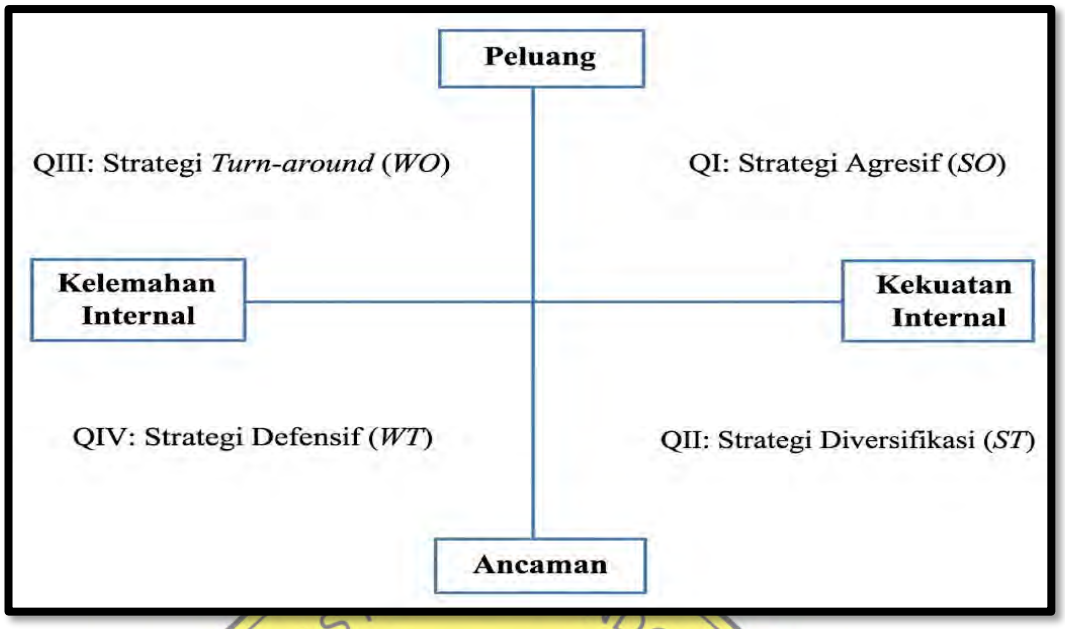
Penyusunan matriks IFAS dan EFAS adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan serta kelemahan dan peluang serta ancaman dalam tabel matrik IFAS dan EFAS. Memberikan bobot pada faktor-faktor berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai terhadap faktor-faktor tersebut. Bobot tersebut akan menunjukkan tingkat partisipasi penting dari faktor internal dan eksternal terhadap suatu keberhasilan instansi. Skala bobot yang diberikan yaitu dari tidak penting (0,0) –

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

sangat penting (1,0) serta semua faktor harus sama yaitu 100% atau 1,0. Setelah memasukan bobot dari faktor internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan penentuan peringkat rating untuk setiap faktor dengan peringkat rating yang diberikan memiliki bobot 1-5, di setiap rating memiliki penjelasan nilai yang berbeda. Apabila bobot dan rating pada setiap faktor telah ditetapkan maka, nilai bobot dan rating dikalikan untuk mendapat skor terakhir. Setelah nilai perkalian bobot dan rating dikalikan untuk mendapatkan nilai skor, maka langkah berikutnya menghitung selisih dari faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.

Hasil dari skor total pembobotan pada faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan akan dibentuk sebagai sumbu X dan hasil dari skor pembobotan pada faktor eksternal berupa peluang dan ancaman akan dibentuk sebagai sumbu Y. Setelah nilai X dan Y telah didapatkan, langkah berikutnya adalah menentukan posisi kuadran pada diagram analisis SWOT dan menyusun strategi berdasarkan posisi kuadran tersebut. Posisi diagram disajikan pada gambar 2

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546



Gambar 2. 1 Diagram SWOT
(*Sumber: Rangkuti,1997)*

Kuadran I: Strategi yang diterapkan adalah strategi agresif (SO) yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang Kuadran II: Strategi yang diterapkan adalah strategi diversifikasi (ST) yaitu strategi yang mengembangkan kekuatan untuk mengurangi ancaman. Kuadran III: Strategi yang diterapkan adalah strategi turn-around (WO) yaitu strategi yang mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman. Kuadran IV: Strategi yang diterapkan adalah strategi defensif (WT) yaitu strategi yang memfokuskan pada pengurangan permasalahan ancaman dan kelemahan.

Setelah mendapatkan strategi yang tepat pada diagram SWOT, selanjutnya menentukan Matriks SWOT. Matriks SWOT adalah matriks yang digunakan untuk merumuskan strategi dengan mengkombinasikan empat faktor yaitu, faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

untuk merumuskan alternatif strategi UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur dalam membangun kolaborasi *stakeholder* serta mengatasi berbagai tantangan pengelolaan hutan di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu. Matriks SWOT disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Matriks SWOT

EFAS / IFAS	***Strengths* (S)** Faktor-faktor yang termasuk dalam kekuatan internal	***Weakness* (W)** Faktor-faktor yang termasuk dalam kelemahan internal
***Opportunities* (*O*)** Faktor-faktor yang termasuk dalam peluang eksternal	**Strategi *Strength-Opportunities* (S-O)** Memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang	**Strategi *Weakness-Opportunities* (W-O)** Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
***Threats* (*T*)** Faktor-faktor yang termasuk dalam ancaman eksternal	**Strategi *Strength-Threats* (S-T)** Memanfaatkan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman	**Strategi *Weakness-Threats* (W-T)** Mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi ancaman

Sumber: (*Rangkuti,1997)*

1. Strategi SO (*Strengths - Opportunities*). Strategi ini berasal dari cara berpikir instansi, memanfaatkan semua yang ada untuk mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia

2. Strategi ST (*Strengths - Threats*). Strategi ini berada dari pendekatan untuk menghadapi berbagai ancaman dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki oleh instansi

3. Strategi WO (*Weakness - Opportunities*). Strategi ini berfokus pada memanfaatkan peluang saat ini dengan meminimalkan kelemahan saat ini.

4. Strategi WT (*Weaknesses - Threats*). Strategi ini bergantung pada tindakan defensif, yang mencoba mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman.

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wanga

Desa Wanga adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Umalulu yang memiliki koordinat -9° 45′ 43″ LS dan 120° 33′ 54″ BT. Jumlah penduduk Desa wanga 1.917 orang dengan jumlah laki-laki 985 orang dan jumlah perempuan 932. Desa Wanga terdiri dari 5 RW, 11 RT dengan jumlah KK 553. Luas wilayah desa wanga yaitu 6. 190 Ha, jarak dari desa ke ibu kota kecamatan 19 Km, dan jarak dari desa ke Ibu kota kabupaten 45 km. Desa Wanga berbatasan dengan beberapa wilayah desa, yaitu:

a. Bagian Utara : Desa Kadumbul
b. Bagian Selatan : Desa Matawai Maringu
c. Bagian Timur : Desa Wanga dan Laut Sabu
d. Bagian Barat : Desa Kota Kawau

Secara geografis, desa Wanga berada di wilayah yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan sebagian dari desa ini berbatasan dengan hutan yang dikelola oleh UPTD KPH Sumba Timur. Suhu yang sejuk cenderung dingin menjadikan daerah ini kaya akan potensi nilai hutan yang mempunyai nilai ekologi maupun ekonomi bagi masyarakat, kebanyakan penduduk desa Wanga bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena itu keberadaan hutan memiliki ketertarikan untuk aktivitas pertanian (Martini *et al*., 2016).

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

UPTD KPH Sumba Timur

Unit pengelola tingkat tapak Sumba Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Perangkat Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016. Tujuan pembentukan UPTD KPH adalah untuk pengelolaan hutan bisa lebih efektif dengan melibatkan perencanaan, perlindungan, penggunaan, rehabilitas serta pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Wilayah kerja UPTD KPH mencakup area hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Tugas dan fungsi UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pola Hubungan Antar Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Wanga

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di desa wanga, pola hubungan yang bangun oleh UPTD KPH sumba timur bersama Masyarakat berjalan dengan baik dengan beberapa *stakeholder* yang terlibat yaitu, Masyarakat desa wanga, UPTD KPH Sumba Timur dan ada juga Perusahaan swasta yaitu PT Muria Sumba Manis. *Stakeholder* tersebut memiliki perannya masing-masing namun saling melengkapi satu sama lain, seperti Masyarakat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan agroforestry, menanam pohon bersama dan juga merawat hutan,

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

sedangkan UPTD KPH berperan memberikan izin, mendampingi dan PT Muria Sumba Manis berperan sebagai mitra yang mendukung dengan menyediakan benih, pelatihan penanaman, perawatan serta bantuan sarana dan prasarana.

Penjelasan ini sejalan dengan penelitian tentang *theory stakeholder* oleh (Freeman & Phillips, 2005) yang menerangkan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola hubungan dengan para *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap tujuan organisasi di mana UPTD KPH Sumba Timur tidak dapat menjalankan pengelolaan hutan secara efektif tanpa dukungan dari masyarakat, pemerintah desa, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, pemetaan posisi *stakeholder* menjadi dasar dalam menentukan strategi kolaborasi sesuai dengan tingkat kepentingan, pengaruh, dan kontribusi masing-masing pihak.

Pola hubungan antar *stakeholder* yang ditemukan dalam penelitian ini juga mencerminkan prinsip *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh (Ansell & Gash, 2007), menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif dibangun melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses bersama, serta adanya pemahaman bersama mengenai tujuan yang ingin dicapai. Di Desa Wanga, mekanisme kolaborasi diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon, rapat koordinasi tingkat desa, pendampingan lapangan oleh UPTD KPH, serta kerja sama dalam kegiatan penghijauan yang melibatkan masyarakat dan PT Muria Sumba Manis. Proses tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada komunikasi yang terbuka,

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

pembagian peran yang jelas, serta partisipasi aktif seluruh *stakeholder* (Anomsari *et al.*, 2014).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kolaborasi UPTD KPH Dalam Pengelolaan Hutan

1. Kepercayaan dan Kebersamaan

Kepercayaan dan kebersamaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi antaara UPTD KPH Sumba Timur dan masyarakat Desa Wanga. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Wanga, keterlibatan mereka dalam kegiatan penghijauan didorong oleh adanya pendampingan dari pihak UPTD KPH Sumba Timur serta manfaat yang diperoleh dari pengelolaan hutan. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian (Rhezandhy, 2025) tentang kinerja perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan di desa Girimulyo yang menekankan bahwa kepercayaan dan kebersamaan antar *stakeholder* adalah syarat yang baik untuk mencapai keberhasilan KPH di Indonesia.

2. Dukungan Kebijakan dan Akses Pendanaan

Dukungan kebijakan dan akses pendanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektiitas kolaborasi antara UPTD KPH Sumba Timur dan Masyarakat Desa Wanga. Dukungan kebijakan terlihat dari adanya peran pemerintah melalui aturan, program kerja, serta arahan teknis. Selain itu, keberlanjutan program kolaborasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber pendanaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan, baik melalui program pemerintah maupun dukungan dari pihak swasta seperti PT Muria Sumba

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

Manis dalam bentuk penyediaan bibit, sarana pendukung, dan kegiatan pendampingan masyarakat.

3. Partisipasi dan Insentif Ekonomi Masyarakat

Kolaborasi dianggap berhasil jika benar-benar memberi manfaat nyata kepada masyarakat setempat, di Desa Wanga kemampuan pariwisata alam dan manfaat lingkungan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam menjaga hutan. Partisipasi masyarakat semakin meningkat karena adanya peluang ekonomi yang diberikan oleh program kehutanan, sehingga mengurangi jumlah perambahan hutan yang sebelumnya terjadi akibat tekanan ekonomi. Penjelasan ini sejalan dengan (Rusadi *et al.*, 2026) tentang keadilan dalam tata kelola ekosistem menekankan bahwa keberhasilan kerja sama dalam menjaga hutan sangat bergantung pada adilnya akses dan manfaat ekonomi langsung yang diberikan kepada masyarakat.

Analisis *Internal Strategy Factor Summary* (IFAS) dan *External Strategy Factor Summary* (EFAS)

Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang terdapat di Desa Wanga dan UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur.

1. Faktor Internal

Faktor Internal berupa kekuatan *(Stength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Desa Wanga dan UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

dalam membangun kolaborasi dan mengatasi tantangan pengelolaan hutan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.3. Matriks IFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
	Kekuatan			
1	Kedekatan dengan wilayah kolaborasi antara UPTD dan Pemerintah Desa Wanga*	0,06	4	0,28
2	Pengelola memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan hutan*	0,07	5	0,36
3	UPTD KPH dan Penyuluh Pertanian kehutanan memiliki struktur organisasi formal.*	0,07	5	0,32
4	Kerja sama antara UPTD dan Pemerintah Desa berjalan dengan baik**	0,14	5	0,68
5	Nilai dan aturan adat mendukung perlindungan kawasan hutan**	0,12	4	0,48
6	UPTD terbuka terhadap kerja sama dan advokasi**	0,11	4	0,47
Jumlah		0,58		2,58
Kelemahan			**Rating**	
1	Keterbatasan anggaran menghambat program pengelolaan hutan*	0,08	5	0,38
2	SDM yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan lapangan*	0,06	4	0,28
3	Sistem koordinasi antar lintas sekor belum optimal*	0,05	4	0,19
4	Partisipasi masyarakat dalam program kehutanan masih perlu ditingkatkan**	0,13	5	0,60
5	Sarana edukasi dan demonstrasi lapangan belum memadai**	0,10	4	0,35
Jumlah		0,42		1,80
S-W		1,00		0,78

Sumber: Data Primer, 2026

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

Berdasarkan tabel 3.1 total skor dari faktor kekuatan yaitu, 2,58 dan kelemahan yaitu, 1,80 yang berarti faktor kekuatan yang dimiliki oleh UPTD KPH dan masyarakat desa lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan yang dimiliki. Skor ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara UPTD KPH dan masyarakat Desa Wanga memiliki potensi untuk berkembang dan tetap menjalin kerja sama yang baik karena adanya kekuatan yang dimiliki, meskipun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Selisih skor kekuatan dan kelemahan dalam analisis IFAS yaitu 0,78 menunjukkan bahwa kolaborasi antara UPTD KPH wilayah kabupaten Sumba Timur dan masyarakat Desa Wanga dalam pengelolaan hutan berada pada posisi yang baik.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang dimiliki oleh UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur dan Desa Wanga dalam membangun kolaborasi dan mengatasi tantangan pengelolaan hutan disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.4. Matriks EFAS

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
	Peluang			
1	Tersedia peluang kemitraan dengan LSM dan penyuluhan pertanian kehutanan **	0,07	4	0,28
2	Masyarakat sangat berpengaruh dalam penguatan pengelolaan hutan*	0,08	5	0,34
3	Program pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hutan**	0,14	5	0,65
4	Program kehutanan dapat membuka peluang usaha (HHBK/jasa lingkungan)**	0,14	5	0,63

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

5	Tersedia peluang pendanaan untuk program konservasi dan pemberdayaan**	0,13	4	0,53
Jumlah		0,55		2,44
Ancaman			**Rating**	
1	Tekanan ekonomi masyarakat mempengaruhi kelestarian hutan*	0,07	4	0,28
2	Pembukaan lahan mengurangi luas Kawasan hutan*	0,06	3	0,19
3	Konflik lahan berpotensi terjadi di sekitar kawasan hutan**	0,09	3	0,28
4	Perubahan iklim mempengaruhi hasil hutan dan sumber air**	0,12	4	0,43
5	Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor kehutanan**	0,12	4	0,45
Jumlah		0,45		1,64
O-T		1		0,80

Sumber: Data Primer, 2026

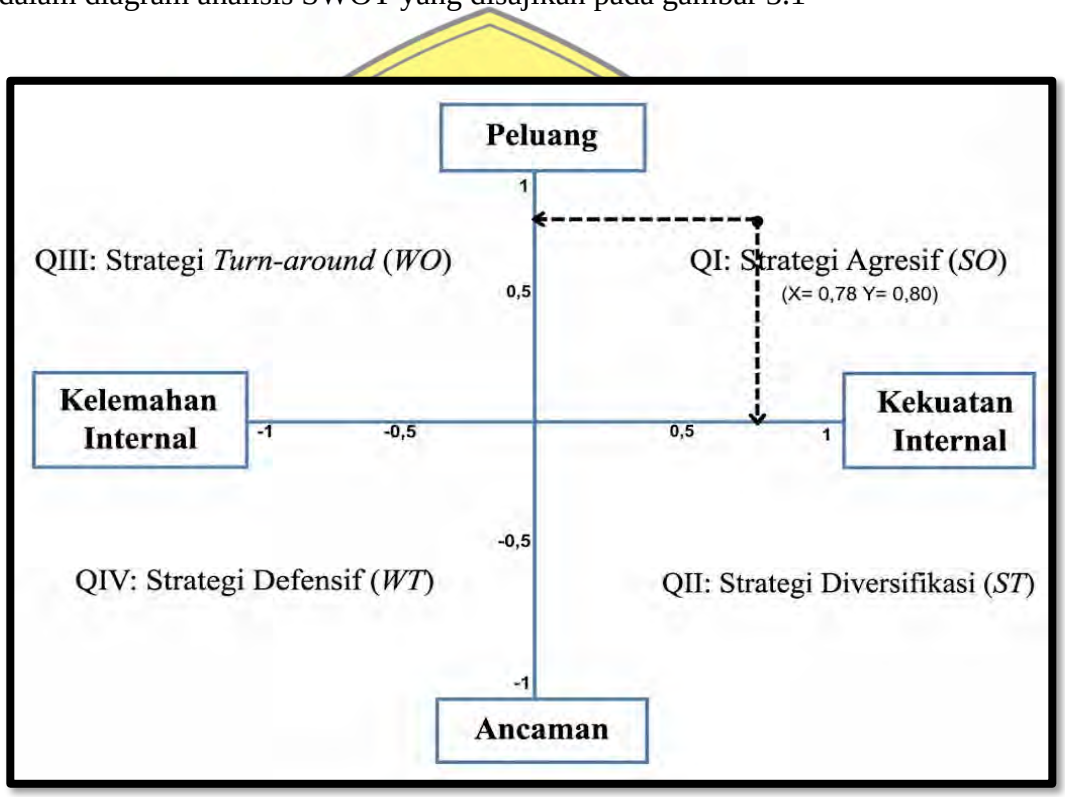
Berdasarkan tabel 3.2. Total skor dari peluang yaitu 2,44 dan ancaman yaitu 1.64 berarti peluang yang ada lebih besar daripada ancaman. Skor ini menunjukkan peluang yang dimiliki lebih besar dan dapat mengatasi ancaman jika kolaborasi berjalan dengan baik. Selisih skor peluang dan ancaman dalam analisis EFAS yaitu 0,80 menunjukkan bahwa kolaborasi UPTD KPH wilayah kabupaten Sumba Timur dan masyarakat Desa Wanga berada dalam posisi yang baik untuk berkembang.

Diagram SWOT

Berdasarkan hasil perhitungan total skor pada matriks faktor internal dan matriks faktor eksternal yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh nilai titik koordinat yang menentukan arah kebijakan strategi organisasi. Penentuan titik posisi ini didasarkan pada nilai rumusan selisih dari masing-masing dimensi faktor

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

strategi. Koordinat sumbu X yaitu faktor internal yang diperoleh dari total skor kekuatan dikurangi total skor kelebihan (S - W), yang menghasilkan nilai positif sebesar 0,78. Sementara itu, Koordinat sumbu Y yaitu faktor eksternal yang diperoleh dari total skor peluang dikurangi total skor Ancaman (O - T), yang menghasilkan nilai positif sebesar 0,80 sehingga titik koordinat yang diperoleh adalah (0,78:0,80) berada pada kuadran 1. Hasil perhitungan tersebut digambarkan dalam diagram analisis SWOT yang disajikan pada gambar 3.1



Gambar 4. 1 Diagram SWOT

Posisi UPTD KPH Sumba Timur berada pada kuadran I, berada pada situasi yang sangat menguntungkan dan posisi ini menunjukkan bahwa UPTD KPH memiliki kekuatan yang baik dan peluang besar. Strategi yang dapat diterapkan adalah strategi agresif (SO) yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

menangkap peluang. Strategi agresif ini diterapkan melalui beberapa langkah utama yang saling terkait. Langkah pertama berfokus pada pada program yang didasarkan pada pemberdayaan Masyarakat oleh UPTD KPH dengan memanfaatkan hubungan kolaborasi yang baik dengan pemerintah desa serta memperkuat kebijakan dan masyarakat desa Wanga. Langkah kedua dilakukan dengan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan kemampuan teknis yang dimiliki pengelola untuk mengemas potensi kawasan menjadi sumber pendapatan baru yang berbasis bukan kayu, pengembangan ini dilakukan dengan cara membuat usaha dari HHBK secara lokal serta memaksimalkan jasa lingkungan seperti pengembangan ekowisata. Penjelasan ini sejalan dengan penelitian (Ruslan *et al*., 2024) mengenai ekonomi masyarakat yang menerangkan bahwa menjadi solusi untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dan mengalihkan fokus ekonomi Masyarakat. Selain strategi pada kuadran I, strategi pada kuadran II, III, IV juga perlu diperhatikan agar kolaborasi antara UPTD KPH dan masyarakat Desa Wanga dapat dilaksanakan secara efektif dengan memanfaatkan peluang, mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan dan mengurangi dampak ancaman yang ada.

Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk membangun kolaborasi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang telah dianalisis. Matriks SWOT disajikan pada tabel 4.5.

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

Tabel 4. 1 Matriks SWOT

IFAS / EFAS	***Strength* (kekuatan)**	***Weakness* (Kelemahan)**
	1. Kedekatan wilayah kolaborasi antara UPTD KPH dan Pemerintah Desa Wanga 2. Pengelola memiliki kemampuan teknis yang baik dalam pengelolaan hutan 3. UPTD KPH dan Penyuluh Pertanian kehutanan memiliki struktur organisasi yang resmi 4. Kerja sama antara UPTD dan Pemerintah Desa berjalan dengan baik 5. Nilai dan aturan adat mendukung perlindungan kawasan hutan 6. UPTD terbuka terhadap kerja sama dan advokasi	1. Keterbatasan anggaran menghambat program pengelolaan hutan 2. SDM yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan lapangan 3. Sistem koordinasi antar lintas sekor belum optimal 4. Partisipasi masyarakat dalam program kehutanan masih perlu ditingkatkan 5. Sarana edukasi dan demonstrasi lapangan belum memadai
***Opportunities* (Peluang)** 1. Tersedia peluang kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan penyuluhan pertanian kehutanan 2. Masyarakat sangat berpengaruh dalam penguatan pengelolaan hutan 3. Program pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 4. Program kehutanan dapat membuka peluang usaha (HHBK/jasa lingkungan). Tersedia peluang pendanaan untuk program konservasi dan pemberdayaan	**Strategi S-O** 1. Memperkuat kemitraan kolaborasi antara UPTD KPH, masyarakat desa Wanga penyuluh pertanian kehutanan untuk mendukung pengelolaan dan pemberdayaan hutan.(S1,S3,O1,O2) 2. Meningkatkan kemampuan teknis dan struktur organisasi untuk mengakses kegiatan-kegiatan dan pengembangan HHBK/jasa lingkungan (S2,S3,S6,O3,O4,O5) 3. Memanfaatkan dukungan nilai adat sebagai dasar perkembangan program konservasi berbasis masyarakat (S5,O2,O5)	**Strategi W-O** 1. Memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan melalui kolaborasi antara UPTD KPH, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menekan pembukaan lahan serta konflik Kawasan (S1,S4,S4,T2,T3) 2. Memanfaatkan kemampuan teknis pengelola dalam menerapkan pengelolaan hutan adaptif terhadap perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.(S2,T4) 3. Mengoptimalkan aturan adat dan kerjasama kelembagaan untuk mengurangi tekanan ekonomi terhadap hutan melalui pemanfaatan hutan secara lestari. (S4,S5,S6,T1)
***Threats* (Ancaman)** 1. Tekanan ekonomi masyarakat mempengaruhi kelestarian hutan 2. Pembukaan lahan mengurangi luas Kawasan hutan 3. Konflik lahan berpotensi terjadi di sekitar kawasan hutan 4. Perubahan iklim mempengaruhi hasil hutan dan sumber air Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor kehutanan	**Strategi S-T** 1. Memanfaatkan program pemerintah dan sumber pendanaan eksternal untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengelolaan hutan.(W1,O3,O5) 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan dan pengembangan usaha HHBK (W4,O2,O4) 3. Mengembangkan sarana edukasi dan demonstrasi lapangan dengan dukungan pemerintah dan mitra konservasi.(W5,O1,O3	**Strategi W-T** 1. Meningkatkan koordinasi untuk memperkuat kapasitas SDM dan mencegah konflik lahan, mengendalikan pembukaan kawasan hutan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. (W2, W3, T2, T3, T4) 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan guna mengurangi tekanan ekonom. (W4, W5, T1, T5 3. Mengupayakan pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan pemerintah dan mitra untuk mendukung kegiatan konservasi. (W1, T1, T4)

Sumber: Data Primer, 2026

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT pada tabel 4.5 menghasilkan empat alternatif strategi, yaitu:

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*)

Strategi SO adalah strategi yang memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat kekuatan, seperti:

a. Memperkuat kemitraan kolaborasi antara UPTD KPH, masyarakat desa Wanga penyuluh pertanian kehutanan untuk mendukung pengelolaan dan pemberdayaan hutan.
b. Meningkatkan kemampuan teknis dan struktur organisasi untuk mengakses kegiatan-kegiatan dan pengembangan HHBK/jasa lingkungan
c. Memanfaatkan dukungan nilai adat sebagai dasar perkembangan program konservasi berbasis masyarakat

2. Strategi ST (*Strengths-Threats*)

Strategi ST adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, seperti:

a. Memanfaatkan program pemerintah dan sumber pendanaan eksternal untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengelolaan hutan
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan dan pengembangan usaha HHBK
c. Mengembangkan sarana edukasi dan demonstrasi lapangan dengan dukungan pemerintah dan mitra konservasi

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

3. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*)

Strategi WO adalah strategi yang mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang seperti:

a. Memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan melalui kolaborasi antara UPTD KPH, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menekan pembukaan lahan serta konflik Kawasan
b. Memanfaatkan kemampuan teknis pengelola dalam menerapkan pengelolaan hutan adaptif terhadap perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan sumber daya hutan
c. Mengoptimalkan aturan adat dan kerjasama kelembagaan untuk mengurangi tekanan ekonomi terhadap hutan melalui pemanfaatan hutan secara Lestari

4. Strategi WT (*Weakness-Threats*)

Strategi WT adalah strategi yang dilakukan dengan cara mengurangi kelemahan agar bisa menghindari ancaman, seperti:

a. Meningkatkan koordinasi untuk memperkuat kapasitas SDM dan mencegah konflik lahan, mengendalikan pembukaan kawasan hutan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program edukasi, penyuluhan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan guna mengurangi tekanan ekonom
c. Mengupayakan pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan pemerintah dan mitra untuk mendukung kegiatan konservasi.

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

Dampak kolaborasi saat ini

Dampak dari kolaborasi antar-*stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan hutan secara nyata memberikan dampak positif, dampak ini ditandai dengan munculnya model pengelolaan bersama yang menekankan ketergantungan *stakeholder*. Salah satu dampak positif yang dapat diterapkan adalah pola kerja sama yang terbuka dan didasarkan pada prinsip saling membutuhkan antar pihak melalui tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2008). Penjelasan ini sejalan dengan dengan Suharjo (2021) mengenai interaksi kerja sama yang kuat karena adanya penggunaan dana dari luar melalui skema tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh sektor swasta melalui PT Muria Sumba Manis dengan adanya campur tangan pihak ketiga tersebut memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan masukan produksi berupa benih berkualitas, membantu dalam pengalihan teknik budidaya dan memperkuat pengawasan terkait partisipasi dalam kegiatan rehabilitas.

Selain faktor teknis dan manajemen, kerja sama ini juga bisa meningkatkan nilai pelestarian yang berdasarkan pada kearifan lokal dengan menggabungkan kebijakan tentang pelestarian hutan aturan adat setempat dapat membantu masyarakat mengatur diri sendiri dengan lebih baik sehingga mematuhi peraturan secara sukarela tanpa dipaksa oleh pemerintah (Nurjala, 2019). Dampak sosiologi itu juga berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat karena adanya pengembangan program agroforestri, masyarakat memiliki alternatif penghasilan berupa HHBK dengan menggabungkan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Stabilitas ekonomi rumah tangga yang diperoleh secara ilmiah terbukti menjadi cara paling efektif untuk mengurangi kerusakan hutan (Awang *et al*,. 2020).

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengelolaan hutan di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan oleh keterlibatan dan hubungan kolaboratif antar-*stakeholder*, yaitu masyarakat Desa Wanga, pemerintah desa, UPTD KPH Sumba Timur, dan pihak swasta. Masing-masing *stakeholder* memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pelaksana kegiatan di tingkat lapangan, penyedia dukungan teknis dan sarana prasarana, hingga pemberi izin serta pendampingan dalam pengelolaan hutan.
2. Efektivitas kolaborasi di tingkat lapangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: kepercayaan dan kesamaan, dukungan kebijakan dan sarana prasarana, serta partisipasi dan insentif ekonomi masyarakat.
3. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi strategis dari IFAS dengan nilai kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan dengan skor selisih S - W = 0,78. Sementara itu, EFAS menunjukkan peluang jauh lebih besar dibandingkan ancaman dengan skor selisih O - T = 0,80. Koordinat posisi organisasi berada pada titik (0,78 ; 0,80), yang menempatkan UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur di Kuadran I yaitu Strategi Agresif.

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

Saran

1. Bagi UPTD KPH Sumba Timur Perlu meningkatkan tata kelola kolaboratif melalui forum komunikasi yang dilakukan secara teratur dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Bagi Pemerintah desa dan masyarakat diharapkan untuk meningkatkan keterlibatan pada setiap aspek pengelolaan hutan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi strategi kolaboratif termasuk dampaknya terhadap kondisi ekologis hutan.

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
JAKARTA
YAYASAN ADMINISTRASI INDONESIA

DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2
P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546

DAFTAR PUSTAKA

Anomsari, E. T., & Forum, C. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Studi Kasus Di Kecamatan Karanggayam , Kebumen. I(1), 75–91.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance In Theory And Practice. 543–571.

Arif. (2024). Dan R & D. In Cv Saba Jaya Publishr.

Awang, S. A. (2020). Dinamika Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Yogyakarta.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29.

Freeman, R. E. E., & Phillips, R. A. (2005). Stakeholder Theory: A Libertarian Defense. *Ssrn Electronic Journal*, (01).

Fithriyani. (2023). Analisis Strategi IFAS dan EFAS dalam Tata Kelola Lingkungan. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, *5*(1), 45–58.

Martini, E., Roshetko, J. M., Purnomosidhi, P., & Sebastien, G. (2016). Kebutuhan Penyuluhan Agroforestri untuk Rehabilitasi Lahan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *World Agroforestry Centre (ICRAF)*.

Nurjala. (2019). Integrasi Kearifan Lokal dan Hukum Adat dalam Pelestarian Hutan. *Jurnal Hukum Adat dan Lingkungan*, *3*(1), 22–35.

Rahman, M. E., Ahmad, A., & Musyarofah. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *Islamic Management*, 3(2), 116.

Rangkuti, F. (1997). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama.

Rhezandhy. (2025). Kinerja Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Girimulyo. *Jurnal Perhutanan Sosial*, *4*(1), 12–25.

Rusadi, N., Pratiwi, R., Tamrin, M., Apriani, N., Ramli, M. A., Sila, S. A. R., ... & Samad, R. S. (2026). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Kamiya Jaya Aquatic.

Ruslan, S., Hadun, R., & Tamrin, M. (2024). Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Di Desa Sagea Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Kehutanan Papuasia*, *2*(3), 25–33.

P-ISSN : 2654-5721
E-ISSN : 2654-7546
DOI : https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v10i2

Sesfao, M., Kehutanan, P. S., Pertanian, F., & Cendana, U. N. (2025). Strategi Pemasaran Teh Daun Kelor Dari Kebun Bibit Rakyat (Kbr) Bpdas Benain Noelmina (Studi Kasus Kelompok Tani Tunas Kadalak Desa Haliklaran Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka) *Jurnal Pertanian dan Kehutanan*, *3*(1), 10–22.

Suharito. (2014). Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Ketergantungan Sumber Daya.

Zakaria, R. Y., & Et Al. (2018). Naskah Akademik Reformulasi Kebijakan Perhutanan Sosial. *Academia.Edu*, (January).